

# THE IMPLEMENTATION OF FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLE IN THE PROCUREMENT OF GOODS OR SERVICES CONTRACT BETWEEN THE PADANG DEPARTMENT OF PUBLIC WORK AND AFIZA LIMKO CONSULTING COMPANY

(Sonya Silvia, 1520123064, Notary Master Degree Study Program Faculty of Law, Andalas University, Padang, 101 pages)

## UNIVERSITAS ANDALAS ABSTRACT

One of the main underlying principles of contract law is freedom of contract principle to which Indonesia has adhered (*beginsel der contracts vrijheid*). The agreement gives broadest freedom to people to have an agreement which contains anything as long as it does not violate public order and moral. In its development, freedom of contract can bring injustice. In practice, agreements are often made in standard contracts. The standard agreement indicates the dominance of one party in which its nature limits the freedom of contract principle. Procurement of goods or services is an attempt to obtain the desired goods and services using certain methods and processes to reach agreement. Procurement of goods or services contract between providers and users is set in the agreement whose format has been prepared by the user. This research deals with the following problems; 1) is the government procurement contract between Padang Department of Public Work and Afiza Limko Consulting Company in accordance with the freedom of contract principle? 2) What is the form of government procurement agreement between Padang Department of Public Work and Afiza Limko Consulting Company? This is an analytical descriptive research that uses the empirical juridical method. The objects of the research cover legal principles and the effectiveness of law in the society. The data consists of interviews, contract documents and their implementation in the society. Techniques of data collection are document studies and interviews. The research reveals that the procurement of goods or services contract between the Padang Department of Public Work and Afiza Limko Consulting Company does not meet freedom of contract principle because the contents of the contract have been determined by the government. In other words, there is no opportunity to negotiate and understand the contents of the contract. The contract is in the form of a named agreement (*benoemd overeenkomst*) as a public agreement which is consensual and formal. It is suggested that the government immediately draft legislation on contracts, with provisions that specifically relate the authority of the notary in the procurement of goods and services contract.

**Keywords:** Implementation, Freedom of Contract Principle, Procurement of goods or services.

# **PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA OLEH PEMERINTAH ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG DENGAN CV AFIZA LIMKO KONSULTAN**

(Sonya Silvia, 1520123064, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 101 halaman)

## **ABSTRAK**

Salah satu asas utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Indonesia merupakan Negara yang menganut asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contracts vrijheid*). Perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan. Prakteknya, perjanjian seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Perjanjian baku menunjukkan dominan salah satu pihak, dimana sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Pengadaan barang atau jasa (*procurement*) merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan. Kontrak pengadaan barang atau jasa antara pihak penyedia dengan pihak pengguna, dituangkan dalam perjanjian yang format bakunya telah disiapkan oleh pihak pengguna. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; 1) Apakah kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak? 2) Bagaimana bentuk perjanjian pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan?. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis dengan objek kajian meliputi asas-asas hukum, efektivitas hukum di Masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, dokumen kontrak dan penerapan ditengah masyarakat. Teknik pengkajian dan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dalam kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan tidak dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak terpenuhi, karena dalam kontrak tersebut pada isinya telah ditentukan oleh pemerintah sehingga kesempatan untuk berunding dan memahami tentang isi kontrak secara keseluruhan menjadi hilang. Kontrak tersebut adalah berbentuk perjanjian bernama (*benoemd overeenkomst*) sebagai perjanjian publik yang mana bersifat konsensuil dan formil. Sebaiknya pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan tentang kontrak, dengan ketentuan yang secara khusus menghubungkan antara kewenangan jabatan Notaris dalam membuat kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah.

Kata Kunci : Penerapan, Asas Kebebasan Berkontrak, Pengadaan barang atau jasa.

**TESIS**

**Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang  
atau Jasa oleh Pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang  
dengan CV Afiza Limko Konsultan**

**Oleh:**

**Sonya Silvia**



**Dosen Pembimbing:**

- 1. Prof. Firman Hasan, S.H.,LLM**
- 2. Dr. Dahlil Marjon, S.H.,MH**

**Program Magister Kenotariatan**

**Fakultas Hukum  
Universitas Andalas**

**Padang**

**2017**